

ANALISIS PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM, DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP PENGELOUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Nanda Vernia Adji Saputri^{1*}, Niniek Imaningsih²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
nandaverniaa@gmail.com^{1*}, niniekimaningsih@gmail.com²

ABSTRAK

Kondisi ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 terus mengalami pertumbuhan yang positif dikarenakan sebagian besar PDRB disumbang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan alat analisis yaitu Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2023, Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, sedangkan Upah Minimum berpengaruh signifikan secara positif dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci: Inflasi, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Tingkat Kemiskinan, Upah Minimum Provinsi

ABSTRACT

The economic conditions in Central Java Province in 2023 continue to experience positive growth due to the majority of GRDP contributed by household consumption expenditure, which increases annually. This study aims to determine the factors that influence household consumption expenditure in Central Java Province. This study uses a quantitative analysis method with an analytical tool, namely Multiple Linear Regression. The results of this study indicate that in 2010-2023, Inflation has no effect on Household Consumption Expenditure, while the Minimum Wage has a significant positive effect and the Poverty Rate has a significant negative effect on Household Consumption Expenditure in Central Java Province.

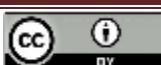
Keywords: Household Consumption Expenditure, Inflation, Poverty Rate, Provincial Minimum Wage

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya tidak akan bisa lepas dari kegiatan konsumi untuk memenuhi kebutuhannya. Pengeluaran konsumsi akan terus melekat pada diri manusia dari lahir hingga akhir hidupnya. Sepanjang hidup manusia pasti melakukan kegiatan konsumsi (Mananja, K. & Marta, J., 2024). Oleh karena itu, setiap manusia pada hakekatnya pasti terlahir dari keluarga dan akan membentuk sebuah rumah tangga, yang artinya pengeluaran konsumsi mereka menjadi bernama pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen pendorong terbesar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) dalam tingkat nasional maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam tingkat regional yang mempunyai dampak signifikan terhadap kualitas

hidup penduduk serta pertumbuhan ekonomi suatu negara. Seiring dengan berjalannya waktu, pengeluaran konsumsi rumah tangga kini dapat dijadikan sebagai alat baru dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi (Y. Zhang et al, 2025).

Pada kuartal 1 tahun 2024, pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 54,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa hampir setengah dari perekonomian Indonesia bergantung pada pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga Indonesia tentunya tidak terlepas dari perhitungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia. Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terpadat dan



terbesar ketiga di Indonesia dengan luas wilayah sebesar 32.800,69 kilometer persegi dan jumlah penduduk sebanyak 37.180,4 ribu jiwa (BPS, 2023) tentunya mempunyai kontribusi yang cukup besar pula dalam menyumbang pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia (N. Sekar Harum et al. 2020).

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang sangat konsisten dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2019 di angka 821948116,9 juta rupiah dan mencapai puncaknya di angka 1.033.374.616,91 juta rupiah pada tahun 2023. Pertumbuhan pada tahun 2019 ke tahun 2020 terlihat tidak cukup signifikan, dilihat dari batang grafik di atas yang hampir tidak ada perbedaanya. Itu dikarenakan terdapat wabah covid-19 yang hampir melumpuhkan perekonomian global termasuk di Indonesia, lalu mengharuskan adanya lockdown.

Terlepas dari besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia maupun di Jawa Tengah, tentunya suatu daerah juga pasti memiliki fenomena ekonomi yang sangat kompleks dan berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian daerah, yang disebabkan oleh naiknya sejumlah komoditas pangan dan non-pangan yang biasa disebut dengan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum yang disebabkan oleh turunnya nilai mata uang pada suatu periode tertentu secara terus-menerus (Ahmad Soleh et al., 2023).

Pada tahun 2010, inflasi di Jawa Tengah tercatat sebesar 4.3%. Lalu inflasi mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sampai menjadi 1.46%. Kemudian pada tahun 2022, inflasi kembali meningkat pesat, hingga mencapai 4.39%. Namun pada tahun 2023, inflasi menunjukkan penurunan kembali di angka 3.8%. Secara keseluruhan, grafik di atas menunjukkan pergerakan inflasi di Jawa Tengah yang cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti harga pangan, aktivitas ekonomi, dan ketika memasuki musim panen.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga juga menjadi penentu kesejahteraan sebuah keluarga. Kesejahteraan suatu rumah tangga pastinya tidak terlepas dari upah atau pendapatan keluarga. Menurut Persaulian (dalam Hidayat dkk, 2024) bahwa para tenaga kerja menjadikan upah minimum sebagai patokan utama pendapatan mereka. Upah Minimum Provinsi merupakan salah satu kebijakan penting dalam penentuan standar upah di Indonesia. Upah Minimum Provinsi adalah standar upah minimum yang

berlaku di seluruh wilayah suatu provinsi yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Besaran upah minimum tersebut pastinya mempengaruhi produktivitas dan kesempatan kerja serta mendorong daya beli masyarakat.

Upah Minimum Provinsi (UMP) di Jawa Tengah dari tahun 2019-2023 terlihat mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2019 ke tahun 2020, UMP tercatat sebesar Rp 1.605.396 menjadi Rp 1.742.015. Lalu pada tahun 2020 sampai 2022, UMP Jawa Tengah terlihat tidak ada kenaikan yang signifikan yaitu hanya menjadi Rp 1.812.935. Namun kemudian, terjadi kenaikan yang cukup signifikan kembali pada tahun 2023 yaitu mencapai Rp 1.958.170. Ini menunjukkan adanya keberhasilan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan standar upah minimum bagi para pekerja.

Disamping itu, tingkat kemiskinan juga merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian Indonesia. Kemiskinan menjadi fokus dan perhatian dalam pembangunan sosial ekonomi di berbagai negara. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat tidak dapat memperoleh sumber daya yang cukup untuk memenuhi standar hidup rata-rata di suatu wilayah yang pada akhirnya menuntut mereka untuk hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut (Rudy & Indah, 2021).

Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah menunjukkan sedikit fluktuasi selama periode 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019-2021 angka kemiskinan naik dari 10.80% menjadi 11.79%. Kenaikan ini disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 yang mempengaruhi perekonomian dan mata pencaharian masyarakat. Meski demikian, dalam periode 2022-2023 penurunan mulai terlihat hingga mencapai 10.77%. Ini merupakan capaian yang cukup baik dan signifikan, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk terus menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Penurunan yang konsisten tersebut mencerminkan efektivitas dari berbagai program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah, meskipun sempat mengalami tantangan selama masa pandemi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat fenomena yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, yaitu kondisi ekonomi di Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah disumbang oleh pengeluaran konsumsi



rumah tangga yang mengalami kenaikan secara konsisten setiap tahunnya. Naiknya pengeluaran konsumsi rumah tangga di Jawa Tengah tentunya tidak terlepas dari adanya pengaruh dari beberapa indikator pengeluaran Jawa Tengah seperti tingkat inflasi dan kemiskinan yang mengalami penurunan, serta Upah Minimum Provinsi yang mengalami kenaikan tiap tahunnya. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas serta bertujuan untuk mengetahui apakah inflasi, upah minimum, dan tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2023.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor seperti inflasi, upah minimum, dan tingkat kemiskinan tersebut berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Teori pengeluaran konsumsi rumah tangga telah menjadi fokus yang penting dalam ilmu ekonomi saat ini karena perannya dalam memahami perilaku ekonomi masyarakat. Para ahli ekonomi telah mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskan bagaimana suatu rumah tangga dalam membuat keputusan konsumsi serta apa saja faktor yang mempengaruhinya.

Teori yang pertama yaitu teori konsumsi absolut yang biasa disebut dengan Teori Konsumsi Keynes (*absolute income hypothesis*). Keynes mengemukakan bahwa besarnya konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan disposabel (*disposable income*). Pendapatan disposibel merupakan pendapatan yang siap dan tersedia untuk dibelanjakan atau ditabung setelah dikurangi dengan pajak (Mankiw, 2010, p.496).

Inflasi

Lalu yang kedua adalah teori inflasi yang berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor fundamental yang berkontribusi terhadap perubahan tingkat harga, menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel ekonomi, dan mencari pola perilaku ekonomi yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi moneter. Teori kuantitas dikemukakan oleh Irving Fisher. Menurut Fisher, inflasi terjadi karena adanya pengaruh dari semakin banyaknya jumlah uang yang beredar serta ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga. Teori ini menjelaskan jika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat dan tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa juga, maka harga barang dan jasa tersebut

akan naik (Fisher dalam Suparmono, 2018, p.140). Dalam konteks jumlah uang yang beredar, walaupun terjadi kenaikan harga barang dan jasa namun tidak diikuti oleh penambahan jumlah uang yang beredar, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai bentuk terjadinya inflasi.

Upah Minimum

Kemudian teori upah minimum disini menggunakan teori upah alami (natural wage) dikemukakan oleh David Ricardo, dan kemudian menjelaskan bahwa upah alami ialah tingkat upah yang cukup untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Maksud dalam teori ini adalah upah terbentuk melalui mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta dianggap sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi para pekerja (David Ricardo, 2010, p.91).

Kemiskinan

Teori kemiskinan pada dasarnya adalah upaya yang dikembangkan oleh para ahli untuk menjelaskan mengapa kemiskinan terjadi, lalu bertahan dan berkembang dalam berbagai konteks sosial, ekonomi dan budaya. Salah satu teori terkenal mengenai kemiskinan yaitu Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (Vicious Circle of Poverty) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Nurkse menyatakan bahwa kemiskinan dapat menciptakan kondisi yang saling berhubungan, dimana saat seseorang mendapatkan pendapatan yang rendah, maka tabungan dan investasi mereka juga akan rendah, yang pada akhirnya akan menyebabkan keterbelakangan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dikerjakan dengan memaparkan sebuah angka-angka dan dilakukan untuk mengungkapkan suatu kebenaran dari teori. Penelitian ini akan menggunakan data time series dengan analisis regresi linier berganda dan menggunakan metode total sampling. Metode total sampling merupakan suatu metode pemilihan sampel dalam sebuah penelitian dimana peneliti secara sengaja memilih suatu sampel berdasarkan dengan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Astalini, 2023).

Penelitian ini menggunakan objek yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terpadat dan terbesar ketiga di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan tahapan mulai dari mengumpulkan data-data melalui web resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dengan kurun waktu 14 tahun yaitu dari tahun 2010-2023. Variabel yang berfungsi sebagai



variabel operasional pada penelitian ini yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan tingkat kemiskinan.

Jenis data pada dasarnya dikategorikan yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Jenis data yang dipilih dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder, yaitu data yang sudah diperoleh dan telah dianalisis oleh suatu instansi terkait kemudian oleh mereka diterbitkan melalui laman web yang dapat diakses oleh masyarakat agar nantinya dapat digunakan untuk pengguna data tersebut (Kurniawan et al., dalam Irma, 2024). Pada penelitian ini, data diperoleh dari situs web Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melakukan studi kepustakaan guna untuk memperoleh informasi, grafik, maupun gambar sebagai dasar teori dalam mencari makalah, jurnal, atau laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Datanya berupa time series dengan melakukan pengujian dari Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan periode 2010 hingga 2023 atau jangka waktu 14 tahun.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi, studi pustaka, dan riset internet (*online research*). Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini untuk mengamati variabel inflasi, Upah Minimum Provinsi, dan tingkat kemiskinan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah adalah dengan menerapkan metode analisis regresi linier berganda melalui konsep *Ordinary Least Square* (OLS). Metode *Ordinary Least Square* (OLS) merupakan metode untuk menduga suatu model regresi populasi atas dasar model regresi sampel dan merupakan yang paling umum digunakan. Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda artinya metode statistik yang digunakan untuk mengkaji sebuah hipotesis dalam melihat hubungan dan pengaruh antar variabel independen yang terdiri dari dua atau

lebih terhadap hanya satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar hubungan dan pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Menurut Ghazali dan Ratmono (dalam Irma, 2024) menyatakan bahwa model penelitian dalam regresi linier berganda adalah:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \mu$$

Keterangan:

Y_i = Variabel Dependend

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi dari variabel bebas 1

X_i = Variabel Independen 1

μ = error

Berdasarkan oleh persamaan tersebut, maka selanjutnya dapat dibuat model persamaan yang akan diterapkan pada penelitian ini, yaitu:

$$PKRT = \alpha + \beta_1 I + \beta_2 UMP + \beta_3 TK + \mu$$

Keterangan:

Y = Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Jawa Tengah

α = Konstanta

β_1 = Koefisien Regresi variabel Inflasi

β_2 = Koefisien Regresi variabel Upah Minimum Provinsi

β_3 = Koefisien Regresi variabel Tingkat Kemiskinan

I = Persentase Tingkat Inflasi

UMP = Upah Minimum Provinsi

TK = Persentase Tingkat Kemiskinan

μ = error

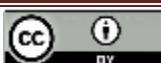
Program aplikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah program aplikasi software SPSS 27. Beberapa uji yang dilakukan pada penelitian ini antara lain, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Lalu akan melakukan uji hipotesis diantaranya adalah uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi parsial (uji t).

HASIL PENELITIAN

Tabel 1

Inflasi, Upah Minimum, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Juta Rupiah)	Inflasi (Persen)	Upah Minimum Provinsi (Ribu Rupiah)	Tingkat Kemiskinan (Persen)
2010	389.637.550,1	6,88	660.000	16,11
2011	429.912.439,0	2,68	675.000	16,21
2012	474.886.733,8	4,24	765.000	14,98
2013	520.380.304,4	7,99	830.000	14,44
2014	570.433.401,2	8,22	910.000	13,58
2015	620.264.015,1	2,73	910.000	13,58



2016	660.988.585,6	2,36	910.000	13,27
2017	711.586.510,5	3,71	1.367.000	13,01
2018	764.808.380,1	2,82	1.486.065	11,32
2019	821.948.116,9	2,55	1.605.396	10,80
2020	822.095.502,2	2,26	1.742.015	11,41
2021	854.472.692,8	1,46	1.798.979	11,79
2022	940.909.555,2	4,39	1.812.935	10,93
2023	1.033.374.616,0	3,80	1.958.170	10,77

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah (2010-2023)

Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c	.200 ^d

Berdasarkan hasil uji pada tabel 2 tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

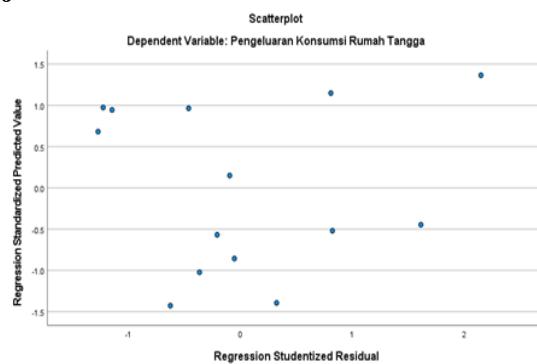
Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Inflasi (X_1)	0,792	1,262
Upah Minimum Provinsi (X_2)	0,131	7,614
Tingkat Kemiskinan (X_3)	0,136	7,346

Berdasarkan tabel tersebut, hasil uji Multikolinearitas melewati VIF didapat perolehan nilai VIF Inflasi (X_1) adalah sebesar 1,262 dengan nilai tolerance sebanyak 0,792. Variable Upah Minimum Provinsi (X_2) nilai VIF senilai 7,614 dengan angka tolerance 0,131. Variabel Tingkat Kemiskinan (X_3) angka VIF sebanyak 7,346 dengan nilai tolerance 0,136. Jika dilihat dari tabel tersebut, nilai VIF keseluruhan dari variable X_1 hingga X_3 tidak terdapat nilai yang lebih besar dari 10 serta nilai toleransinya juga tidak kurang dari 0,1. Bisa diambil kesimpulan yakni regresi tersebut tidak memiliki gejala multikolinearitas

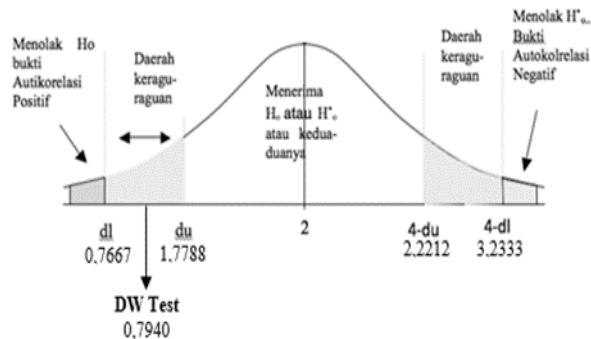
Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Grafik Scatterplot

Berdasarkan gambar 1 di atas, hasil uji Heteroskedastisitas atas Scatterplot diperoleh grafik yang memperlihatkan pola yang tidak jelas atau tidak tertata serta memiliki titik-titik menyebar pada grafik tersebut. Yang artinya bisa diambil kesimpulan bahwa data yang dipakai tidak terdapat gejala Heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi



Gambar 2. Kurva Statistik Durbin-Watson

Dari hasil perhitungan Durbin-Watson tersebut, letak nilai DW test senilai 0,7940 berada di antara dL dan dU. Sehingga menurut dasar pengambilan keputusan Durbin-Watson, nilai DW berada di daerah keraguan yang mana tidak dapat disimpulkan terdapat autokorelasi atau tidak. Oleh karena itu, dilakukan uji Run Test untuk memastikan kembali ada atau tidaknya gejala autokorelasi. Hasilnya diperoleh sebagai berikut.

Pada tabel 4 dibawah ini dapat dilihat bahwa hasil Asymp. Sig. (2-tailed) memiliki nilai sebesar $1,000 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada uji Run Test tidak tampak gejala autokorelasi karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dipastikan berdasarkan hasil uji yang telah dilaksanakan diatas, pada penelitian ini tidak ada pelanggaran asumsi klasik apapun.

Tabel 4. Uji Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-5686910.99426
Cases < Test Value	7
Cases \geq Test Value	7



Total Cases	14
Number of Runs	8
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000
a. Median	

Uji Hipotesis

Tabel 5. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized
	Coefficients
1	B
	(Constant) 969377.899
	Inflasi -1717.946
	Upah Minimum Provinsi .231
Tingkat Kemiskinan	-43290.335

Dari tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa beta konstan senilai 969.337,899. Masing-masing variabel bebas dalam tabel tersebut yakni beta Inflasi senilai -1.717,946. Beta Upah Minimum Provinsi senilai 0,231. Beta Tingkat Kemiskinan senilai -43.290,335. Berdasarkan tabel serta penjelasan tersebut, didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$V.T. PKRT = 969.337,899 - 1.717,946 I + 0,231 UMP - 43.290,335 TK$$

Berdasarkan persamaan model regresi tersebut, dapat diinterpretasikan yakni:

1. Konstanta (β_0)

Besarnya nilai konstantaa (β_0) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y) memperlihatkan sebesar 969.337,899. Jika variabel Inflasi (X_1), Upah Minimum Provinsi (X_2), dan Tingkat

Kemiskinan (X_3) bernilai 0, maka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y) diperkirakan sebesar Rp 969.337,899.

2. Koefisien Regresi Inflasi (β_1)

Nilai Koefisien Regresi (β_1) memiliki nilai negative sebesar -1.717,946 yang memperlihatkan adanya hubungan berlawanan arah antara variabel Inflasi (X_1) dengan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y) menunjukkan bahwa setiap penurunan 1% Inflasi, maka akan meningkatkan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y) sebesar Rp 1.717,946.

3. Koefisien Regresi Upah Minimum Provinsi (β_2)

Koefisien regresi (β_2) memiliki nilai positif sebesar 0,231 memperlihatkan adanya hubungan searah antara variable Upah Minimum Provinsi (X_2) dengan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y). Artinya bahwa jika variabel Upah Minimum Provinsi (X_2) mengalami peningkatan 1.000 rupiah, maka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y) akan meningkat sebesar 0,231%.

4. Koefisien Regresi Tingkat Kemiskinan (β_3)

Koefisien regresi (β_3) memiliki nilai negatif sebesar -43.290,335 memperlihatkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara Tingkat Kemiskinan (X_3) dengan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y) artinya bahwa jika variabel Tingkat Kemiskinan (X_3) mengalami penurunan 1% maka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y) akan naik sebesar Rp 43.290,335.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.978 ^a	.956	.943	46744453.25289

Dari tabel 6 tersebut menunjukkan bahwa kekuatan variabel bebas untuk memberi pengaruh terhadap variabel terikat dengan nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,956 atau senilai 95,6% yang artinya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y) mampu dijelaskan oleh Inflasi (X_1), Upah Minimum Provinsi (X_2) dan Tingkat Kemiskinan (X_3) hingga sebesar 95,6%. Sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini yaitu sebesar 4,4%.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 7. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a

Model	F	Sig.
Regression	73.187	.000 ^b

Dari tabel 7 tersebut, dapat dilihat nilai Sig. adalah 0,000. Jika nilai Sig. $0,000 < 0,05$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan pada uji F dapat diambil kesimpulan yaitu hipotesis diterima atau dengan kata lain secara simultan atau bersama-sama Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y) dipengaruhi oleh Inflasi (X_1), Upah Minimum Provinsi (X_2) dan Tingkat Kemiskinan (X_3). Sedangkan F hitung tersebut memiliki nilai sebesar 73,187. Dikarenakan angka F hitung



$73,187 > F$ tabel 3,34. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain secara simultan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y) dipengaruhi oleh Inflasi (X_1), Upah Minimum Provinsi (X_2) dan Tingkat Kemiskinan (X_3).

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

- Variabel Inflasi (X_1) terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y)

Tabel 8. Uji T Inflasi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Model		t	Sig.
1	Inflasi	-0,256	0,803

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat dilihat bahwa Inflasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,803, yang dimana 0,803 lebih besar dari probabilitas 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama atau H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara Inflasi (X_1) terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y). Sementara itu berdasarkan t hitung variabel Inflasi memiliki nilai sebesar -0,256 yang dimana apabila nilai t hitung negatif, maka menggunakan kriteria pengujian t tabel yang negatif juga. Jadi, jika $-0,256 < t$ tabel -2.228. Bisa diambil kesimpulan bahwa H1 ditolak yang berarti bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah.

- Variabel Upah Minimum Provinsi (X_2) terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y)

Tabel 9. Uji T Upah Minimum Provinsi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Model		t	Sig.
1	Upah Minimum Provinsi	3,100	0,011

Berdasarkan tabel 9 di atas, dapat dilihat bahwa Upah Minimum Provinsi memiliki nilai signifikan sebesar 0,011, yang dimana 0,011 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis kedua atau H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Upah Minimum Provinsi (X_1) terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y). Sementara itu berdasarkan t hitung variabel Upah Minimum Provinsi memiliki nilai sebesar 3,100. Dimana nilai t hitung $3,100 > t$ tabel 2.228. Bisa diambil kesimpulan bahwa H2 diterima yang berarti bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jawa

Tengah.

- Variabel Tingkat Kemiskinan (X_3) terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y)

Tabel 10. Uji T Tingkat Kemiskinan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Model		t	Sig.
1	Tingkat Kemiskinan	-2,358	0,040

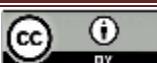
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat Kemiskinan memiliki nilai signifikan sebesar 0,040, yang dimana 0,040 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis ketiga atau H3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Tingkat Kemiskinan (X_1) terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Y). Sementara itu berdasarkan t hitung variabel Tingkat Kemiskinan memiliki nilai sebesar -2,358. Dimana apabila nilai t hitung negatif, maka menggunakan kriteria pengujian t tabel yang negatif juga. Jadi, jika $-2,358 < t$ tabel -2.228. Bisa diambil kesimpulan bahwa H3 diterima yang berarti bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah.

PEMBAHASAN

Inflasi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai signifikansi uji T yang sebesar 0,803, dimana itu lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Disamping itu juga, t hitung variabel inflasi sebesar -0,256, dimana itu $>$ dari t tabel -2,228 sehingga H1 ditolak karena tidak adanya pengaruh dari inflasi terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, variabel inflasi menghasilkan koefisien sebesar -0,026 yang artinya bahwa jika inflasi mengalami peningkatan 1 persen, maka akan menurunkan pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 0,026 persen. Hal tersebut tidak sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara positif terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah karena membuktikan bahwa meskipun tingkat inflasi di suatu daerah itu tinggi, tidak berarti pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah tersebut akan menurun drastis. Beberapa faktor yang menyebabkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah



tangga adalah pertama, karena kebutuhan pokok bersifat inelastis, dimana rumah tangga cenderung lebih berfokus pada kebutuhan dasar seperti (makanan, pakaian, dan perumahan) yang bersifat inelastis terhadap harga. Jadi meskipun harga barang-barang tersebut naik, rumah tangga akan tetap membeli atau mengkonsumsi dikarenakan itu merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan konsumsi rumah tangga.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ahmad Soleh dkk, 2023) yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Inflasi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jambi yang menerangkan hipotesis bahwa secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel inflasi terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jambi.

Upah Minimum terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, nilai signifikansi uji T yang sebesar 0,011, dimana itu lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Disamping itu juga, t hitung variabel Upah Minimum Provinsi sebesar 3,100, dimana itu $>$ dari t tabel 2,228 sehingga H2 diterima karena terdapat pengaruh dari Upah Minimum Provinsi terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, variabel Upah Minimum Provinsi menghasilkan koefisien sebesar 0,309 yang artinya bahwa jika Upah Minimum Provinsi mengalami peningkatan 1.000 rupiah, maka akan meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 0,309 persen. Hal tersebut sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Dari hasil penelitian ini, Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh yang signifikan secara positif terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah karena apabila upah minimum naik, maka pendapatan pekerja juga akan naik, sehingga rumah tangga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan kegiatan konsumsi. Kenaikan Upah Minimum Provinsi berkontribusi nyata dalam meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, bahkan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga secara signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh (Safina & Ria, 2022) yang berjudul Pengaruh Inflasi, Upah Minimum dan Jumlah Penerima BLT terhadap Pengeluaran Konsumsi Perkapita di 7 Kota Jawa Barat Tahun 2018-2022. Hipotesis yang diterangkan adalah bahwa Upah Minimum berpengaruh signifikan positif terhadap pengeluaran konsumsi perkapita di 7 kota Jawa Barat tahun 2018-2022.

Tingkat Kemiskinan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel tingkat kemiskinan secara parsial berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 hingga 2023. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi uji T yang sebesar 0,040, dimana itu lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Disamping itu juga, t hitung variabel tingkat kemiskinan sebesar -2,358, dimana itu $>$ dari t tabel -2,228 sehingga H3 diterima karena terdapat pengaruh dari tingkat kemiskinan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, variabel tingkat kemiskinan menghasilkan koefisien sebesar -1,144 yang artinya bahwa jika tingkat kemiskinan mengalami peningkatan 1 persen, maka akan menurunkan pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1,144 persen. Hal tersebut tidak sejalan dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Dari hasil penelitian ini, tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan secara negatif terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah karena semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka kemampuan rumah tangga dalam melakukan konsumsi akan semakin terbatas, apalagi pada rumah tangga miskin yang cenderung memiliki kemampuan daya beli yang rendah sehingga pengeluaran mereka akan menurun seiring dengan meningkatnya kemiskinan. Rumah tangga miskin akan cenderung lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan primer dengan anggaran yang sangat terbatas, sehingga tingkat konsumsi secara keseluruhan akan menurun saat tingkat kemiskinan meningkat. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga signifikan secara statistik, yang artinya perubahan pada tingkat kemiskinan benar-benar berpengaruh nyata terhadap pola konsumsi rumah tangga, namun jika arahnya secara negatif, itu artinya



dikarenakan tingkat kemiskinan mengurangi kemampuan konsumsi itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dede Irma, 2024) dengan judul Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Banten Tahun 2002-2023. Dalam penelitian tersebut menerangkan hipotesis bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan namun secara negatif terhadap konsumsi rumah tangga di Provinsi Banten tahun 2002-2023

KESIMPULAN

Inflasi tidak berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut disebabkan karena naiknya tingkat inflasi tidak akan mengganggu atau bahkan menurunkan pola pengeluaran konsumsi rumah tangga, dikarenakan ada atau tidaknya inflasi, rumah tangga atau masyarakat akan tetap mengkonsumsi beberapa barang yang dianggap primer karena hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Disamping itu, apabila inflasi yang terjadi masih tergolong rendah, stabil dan terkendali, maka dampaknya terhadap pola konsumsi masyarakat tidak akan terasa signifikan.

Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. hal tersebut disebabkan karena naiknya Upah Minimum Provinsi dapat meningkatkan pendapatan para pekerja, yang artinya rumah tangga memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melakukan kegiatan konsumsi. Kenaikan Upah Minimum Provinsi berkontribusi nyata dalam meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, bahkan dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

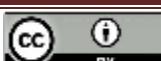
Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi tingkat kemiskinan, maka kemampuan rumah tangga dalam melakukan konsumsi akan semakin terbatas. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga signifikan secara statistik, yang artinya perubahan pada tingkat kemiskinan benar-benar berpengaruh nyata terhadap pola konsumsi rumah tangga, namun jika arahnya secara negatif, itu artinya dikarenakan tingkat kemiskinan mengurangi kemampuan konsumsi itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penulis, maka penulis akan memberikan saran yang ditujukan kepada beberapa pihak yaitu,

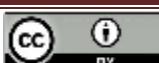
karena inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah, penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami faktor-faktor yang menyebabkan hal ini, seperti apakah perilaku konsumen atau kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga. Lalu pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan mengenai program pengendalian inflasi. Upah Minimum Provinsi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan yang sesuai dengan produktivitas untuk meningkatkan upah minimum agar daya beli masyarakat tetap stabil. Karena tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam mekanisme bagaimana kemiskinan membatasi daya beli rumah tangga dan strategi penanggulangannya di Provinsi Jawa Tengah tersebut. Begitupun pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan mengenai program pengentasan kemiskinan untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, D. M., Azlan, M., & Bachtiar, A. (2025). Analisis Kausalitas Ecm Inflasi, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar Dan Kurs USD (Studi Kasus Post Covid-19 Di Indonesia Tahun 2020-2024). *Jurnal Ekuilnomi*, 7(2), 561-566
- Astalini, A., Darmaji, D., Kurniawan, D. A., Septiani, N., & Azzahra, M. Z. (2023). Revitalizing Science Education: Teachers' Response to Embedding Adat Bersendi Syara' and Syara' Bersendi Kitabullah Values into the Learning Process. *Integrated Science Education Journal*, 4(3), 117–122. <https://doi.org/10.37251/isej.v4i3.735>
- Atmaja, A., Devi, S., Atmaja, H., & Lubis, I. (2022). Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Di Kota Sibolga Tahun 2022 (Implikasi Fungsi Konsumsi Keynes). *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(02), 1 - 13. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i02.920>
- BPS. (2021) Booklet Sakernas. Fungsi Statistik Ketenagakerjaan.
- BPS. (2023). Jumlah Penduduk Menurut Provinsi



- di Indonesia. Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara.
- BPS. (2023). Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia. Badan Pusat Statistik
- Christine, D., Apriwandi, & Rachmat Hidayat. (2023). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Return Saham. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 237–244. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2.713>
- Damanik, D., & Saragih, M. (2023). Korupsi, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 71-81
- Damanik, M. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(2), 142-154
- Daniel, D., & Bahari, Y. (2024). Masalah sosial kemiskinan di Indonesia: Suatu pandangan teoritis Karl Marx. *Gulawentah:Jurnal Studi Sosial*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v9i1.19432>
- Desniar, Y., Ramdhini, W., Rafi', M., (2024). Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja Dan Konsumsi Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Nusantara Journal of Economics*, 6(1), 7-13. <https://doi.org/10.37673/nje.v6i1.4726>
- Dewi, Novita, S., & Lilis, Anisah. (2022). Studi Ketenagakerjaan Jawa Tengah: Analisis Data Sakernas 2019-2022. *Jurnal Ketenagakerjaan*. Volume 18 No. 3. <https://doi.org/10.47198/naker.v18i3.259>
- Diniarty, E. P., Wijimulawiani, B. S., & Anggara, J. (2025). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Per Kapita, Inflasi, Tingkat Pengangguran Dan Harga Terhadap Permintaan Perumahan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014–2023. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 79-84
- Duesenberry, S. James. (1948). Income Saving and The Theory of Consumer Behavior.
- Fajar, M., Pusat, B., & Provinsi Banten, S. (2021). Pemodelan Bayesian Konsumsi Rumah Tangga Agregat Menggunakan Prior Zellner. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/gaussian/>
- Hariyanti, P., Iryani, N., & Ayu, P. (2023). Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Dan Pengaruhnya Terhadap Inflasi Di Sumatera Barat. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 99-108
- Hidayat, S. A., Prodi, R. H., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2022). Pengaruh Inflasi, Upah Minimum dan Jumlah Penerima BLT terhadap Pengeluaran Konsumsi Perkapita di 7 Kota Jawa Barat Tahun 2018-2022. <https://doi.org/10.29313/bcses.v4i1.ID.10925>
- Iskar, M., Rahim, M., Saranani, F. (2024). Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Upah Minimum terhadap Pengeluaran Konsumsi rumah Tangga Kota Kendari. *JPEP: Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*. Volume 9 Nomor 2 tahun 2024. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP>
- Khabib, A. A. (2021). Peran Pendidikan Kewirausahaan untuk Mengatasi Kemiskinan. *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*. Vol.2 No. 06 - Januari 2021.
- Mananja, K., & Marta, J. (2024). Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP) Dampak Inflasi Kebutuhan Pokok Terhadap Pola Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Indonesia: Pendekatan Quadratic Almost Ideal Demand System (Quaids). <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/login>
- Mankiw, N. Gregory. (2010). Macroeconomics, 7th Edition, Worth Publishing.
- Nainggolan, N. E., & Yusnida, Y. (2025). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 1993–2023. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 213-219
- Ningsih, B.K, et al. (2020) Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Inflasi, Tingkat Simpanan dan Nilai Tukar Terhadap Konsumsi Masyarakat di Indonesia Tahun 2000-2018. *DINAMIC: Directory Journal of Economic* Volume 2 Nomor 1. Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia. <https://doi.org/10.31002/dinamic.v2i1.1365>
- Nintan P. (2020) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kediri. *Risk : Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020. <http://ojs.unik>



- kediri.ac.id/index.php/jimek
- Octaviani, Dede Irma (2024) Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Banten Tahun 2002-2023. Diploma atau S1 thesis, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Purba, W., Nainggolan, P., & Panjaitan, P. D. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 62–74. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.336>
- Ramadhan, A. (2023). Determinan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Di Provinsi Sumatra Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 216-224
- Ricardo, David. (2010). On The Principles of Political Economy, and Taxation
- Rudy, S., & Indah, P. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Applied Busriness and Economics (JABE)*. Vol 7 No.2. 271-278
- Saragih, D. N., & Damanik, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Petani Jagung Di Desa Mariah Bandar Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(2), 116-129
- Sekar Harum, N., Aini, M., Alfa Risxi, M., & Kartiasih, F. (2020). Pengaruh Sosial Ekonomi dan Kesehatan terhadap Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 (Socioeconomic and Health Influences on Household Food Consumption Expenditure In Central Java in 2020). Seminar Nasional Official Statistic.
- Sinaga, M., Damanik, S. W. H., Zalukhu, R. S., Hutaeruk, R. P. S., & Collyn, D. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 140-152
- Sinaga, M., Zalukhu, R. S., Collyn, D., Hutaeruk, R. P. S., & Harbain, H. (2025). Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI), Cost of Production (COP), Dan Inflasi Terhadap Daya Saing Ekspor: Tinjauan Literatur. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(2), 527-534
- Soleh, A., Daniel, P. A., Said, M., & Agustina, K. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita dan Inflasi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(2), 1980. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1489>
- Suparmono. (2018). Pengantar Ekonomi Makro: Teori, Soal, dan Penyelesaiannya.
- Yoga, G. A. D. M., & Diputra, G. I. S. (2024). Analisis Data Panel Determinan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekuilnomi*
- Zhang, Y., Yuan, Y., & Zhao, G. (2025). An empirical study on the impact of household debt level on consumption behavior: Based on the mechanism of the housing provident fund system and risk preference. *Finance Research Letters*, 72. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106507>
- Zingales, Luigi. (2020). Friedman's Principle, 50 years Later

